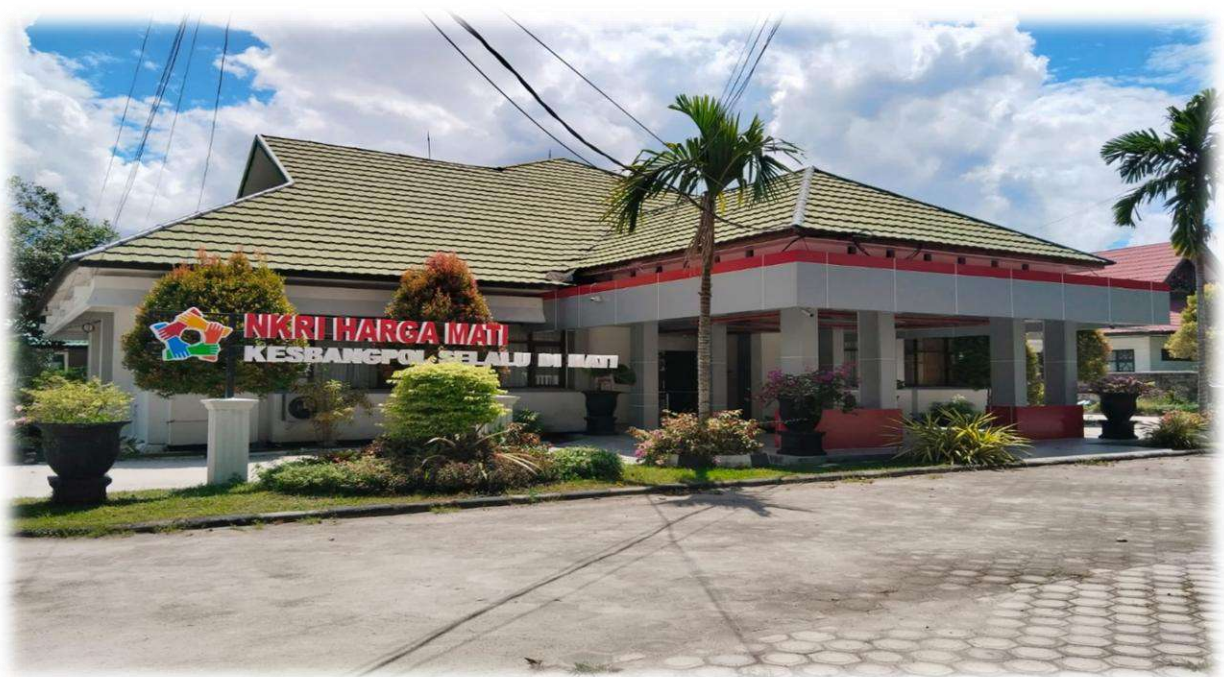




Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Oktober 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 202 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat	39
 BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	59
3.3. Program dan Kegiatan.....	60
 BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
 BAB. V PENUTUP	110
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah	8
Tabel	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	20
Tabel	2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	31
Tabel	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Tengah	40
Tabel	2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	52
Tabel	3.3 Rumusan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	62
Tabel	4.1 Rumusan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	69



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
- (3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - a. RSUD Doris Sylvanus;
 - b. RSJ Kalawa Atei; dan
 - c. RSUD Hanau.
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

- a. Biro Administrasi Pimpinan;
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Perekonomian;
- f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Biro Administrasi Pembangunan;
- h. Biro Organisasi; dan
- i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 36**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



MASKUR, S.H., M.

NIP. 19691025 199603 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik/masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- c. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk **tahun n** dan **tahun n+1**.

Penyusunan program kegiatan pada tahun 2026 ini berpedoman pada Racangan RPJMD 2025-2030 Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2030, dengan sasaran pokok dan kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, serta memperhatikan RPJMN 2025-2029.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah , KUA, PPAS, dan RAPBD.

I.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

7. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 90);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 1 November 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2026 melalui perencanaan kinerja tahunan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai bidang urusan perangkat daerah di tahun 2026.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2026;
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Pemerintahan Umum) dan laporan kinerja.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah disesuaikan terhadap program dan kegiatan yang telah disusun/disesuaikan dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejumlah program dan kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan sudah terpetakan dengan baik, serta sudah memperoleh hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

2.1.1 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Perangkat Daerah dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Realisasi Kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 94,42 % mempunyai implikasi baik

terhadap pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Target Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Satuan	Target Realisasi Kinerja (%)		Kategori
					Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,75	Nilai / Angka	77,57	98,50%	Baik
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	85%	Persen	100%	117,65%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	100	orang	1439	919%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	85%	Persen	37,04%	43,58%	Cukup
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	orang	600 orang	300%	Sangat Baik

2. Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Rencana Strategis 2021-2026.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA (Kumulatif)	Realisasi 2024	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,75	77,57	98,50%
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	85%	100%	117,65%
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	100	1439	919%
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	85%	37,04%	43,58%
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	600 orang	300%

3. Evaluasi Penyesuaian Perubahan Target Kinerja tahun 2026-2030

Masa Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah dilaksanakan mengalami perubahan atau transisi pada Tahun Anggaran 2026, hal ini disebabkan karena adanya perubahan periode RPJMD dan Renstra yang menyesuaikan dengan periode masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih untuk masa jabatan 2025-2029. Target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, sudah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini	Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai)	68	Nilai
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)	68,6	Nilai
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	82	Persen
4	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	75	Persen
5	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kinerja Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	65,5	Persen

2.1.2 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Penyusunan program kegiatan yang bersifat kelanjutan / berkesinambungan dari tahun sebelumnya mengacu pada program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 serta berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah 2021-2026 yang dirubah dengan adanya RPJMD baru dengan periode 2025-2030 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2030.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 (terlampir).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	1000	200	200	200	100%	200	1.439	60%
8,01,02,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,02,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,02,1,01,02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,02,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500	100	100	100	100%	100	100	100%
8,01,02,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500	100	100	100	100%	100	1.339	1.339%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,02,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20	4	4	4	100%	4	4	100%
8,01,02,1,01,06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5	1	1	1	100%	1	1	100%
8,01,03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	79,25	78,50	78,50	78,50	100,00%	78,75	78,47	99,64%
8,01,03,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5	1	1	1	100%	1	1	60%
8,01,03,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	1	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8,01,03,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	1	60%
8,01,03,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500	100	100	100	100%	100	300	60%
8,01,03,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500	100	100	100	100%	100	300	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,03,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20	4	4	4	100%	4	4	60%
8,01,04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	95%	80%	80%	80%	100%	85%	100%	117%
8,01,04,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,04,1,01,01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,04,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,04,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250	50	50	50	100%	50	150	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,04,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250	50	50	50	100%	50	150	60%
8,01,04,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1000	200	200	200	100%	200	600	300
8,01,05,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,05,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,05,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,05,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000	200	200	200	100%	200	600	60%
8,01,05,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000	100	100	100	100%	100	300	30%
8,01,05,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	95%	80%	80%	80%	100%	85%	37,04%	43,52%
8,01,06,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,06,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,06,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,06,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500	100	100	100	100%	100	300	60%
8,01,06,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	280	56	56	56	100%	56	168	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,06,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,06,1,01,06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8,01,01,1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30	6	6	6	100%	6	18	60%
8,01,01,1,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100%	2	6	60%
8,01,01,1,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,01,1,01,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,01,1,01,04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,01,1,01,05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,01,1,01,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,01,1,01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,01,1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8,01,01,1,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185	37	37	37	100%	37	111	60%
8,01,01,1,02,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	12	12	100%	12	36	60%
8,01,01,1,02,04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,01,1,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,01,1,02,06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,01,1,02,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	60	12	12	12	100%	12	36	60%
8,01,01,1,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	25	5	5	5	100%	5	15	60%
8,01,01,1,03,02	Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,01,1,03,03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60%

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,01,1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8,01,01,1,07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang disediakan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
8,01,01,1,07,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	820	164	164	164	100%	164	492	60%
8,01,01,1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
8,01,01,1,08,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,01,1,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,01,1,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
8,01,01,1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8,01,01,1,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	105	21	21	21	100%	21	63	60%
8,01,01,1,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
8,01,01,1,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	20	20	20	100%	20	60	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA SKPD) Tahun 2026 (Akhir Tahun RENSTRA)	Realisasi Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan SKPD Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,01,01,1,09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	150	30	30	30	100%	30	90	60%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2024 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah disusun didalam Rencana Kerja Tahun 2024.

TABEL 2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,75	77,57	98,50%	Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain : - Variabel Aspek Kesetraraan mendapat nilai 77,66. - Variabel Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi mendapat nilai 73,07
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	85%	100%	177,65%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap Ormas. LSM, dan OKP aktif antara lain : - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun 2024 , bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (5/3/2024) yang diikuti oleh 50 orang peserta yang merupakan anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; - Kegiatan Dialog Interaktif Pemberdayaan Ormas "NGOPI ITAH", Ngobrol Pintar, Interaktif, Tajam, Makin Berkah dengan Tema : Peran Strategis Ormas dalam menyukseskan Pilkada Serentak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada tanggal 24 Juli 2024. Sebagaimana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; - Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat Badan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7
						Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah; - Kegiatan Sosialisasi "Kalimantan Tengah Bersinar (Bersih dari Narkotika)" dengan tema "Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika, Mewujudkan Kalimantan Tengah Semakin Berkah dan Menuju Indonesia Emas 2045" yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri
						dari pengurus Organisasi Kemasyarakatan / Kepemudaan / Forum / Lembaga yang ada di Kalimantan Tengah; Dialog Kebangsaan Dalam Mewujudkan Pilkada 2024 yang Aman, Damai, dan Harmoni dengan Tema "Merajut Kerukunan di Tengah Dinamika Pilkada" yang dilaksanakan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat, menciptakan dialog yang konstruktif, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam upaya mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan harmonis, sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila. Peserta dialog ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari Tokoh Adat, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	100 orang	1.439	719,5%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain : - Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024 di Ruangank Bersinar Abadi Best Western Hotel Palangka Raya. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024" dengan tema Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam menumbuhkembangkan Generasi Yang Tangguh, Mandiri dan Berkarakter Pancasila yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan guru pengampu pendidikan Pancasila pada SMA dan SMK yang ada di Kota Palangka Raya; - Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Tahun 2024 dengan tema "Generasi Muda sebagai Agen Perubahan dalam Membangun dan Memperkuat Jati Diri Bangsa Indonesia melalui Nilai-Nilai Bela Negara". Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan siswa/siswi SMA dan SMK di Kota Palangka Raya;
						- Lomba Cerdas Harati Pancasila diikuti oleh 13 regu yang masing-masing terdiri dari tiga peserta, mewakili kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Para peserta diuji pemahamannya mengenai berbagai aspek Pancasila, wawasan kebangsaan, serta karakter

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7
						bangsa. Adapun para juri yang akan menilai peserta terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat; - Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Walikota Palangka Raya ini diikuti oleh generasi muda perwakilan dari 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah sebanyak 1.000 orang peserta dan dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan, termasuk Plt. Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalimantan Tengah, serta sejumlah
						perwakilan dari kalangan pelajar dan pemuda; - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diikuti peserta berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Terkait, SMAN / SMKN / SMAS/ SMKS / Sederajat, Forum Pembauran Kebangsaan, Perbankan, Perguruan Tinggi, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Organsasi Kepemudaan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya; - Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2024, diikuti peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang orang yang terdiri dari Anggota Paguyuban FPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Insan Pers di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini mengangkat tema "Peningkatan Peran Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Menangkal Isi Politik Identitas menjelang Pilkada 27 November 2024." Sosialisasi ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi antar-suku di Kalimantan Tengah, serta mencegah politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat; - Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Barito Timur, diikuti peserta berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, ketua paguyuban/suku dan masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur.
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase	85%	37,04%	43,58%	Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 81 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat, 30 permasalahan telah dapat diselesaikan (37,04%) dan sisanya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	6	7
		kasus yang telah ditangani)				sedang dalam proses tindak lanjut penyelesaian.
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200 orang	600 orang	300%	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain : - Dalam rangka menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, terutama kepada generasi muda yang merupakan penerus bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 03 Oktober 2024 bertempat di Balai SMAN 4 Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama Bagi Generasi Muda Tahun 2024 dengan tema "Menghargai Perbedaan, Memperkuat Kerukunan: Generasi Muda Sebagai Duta Toleransi" yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan pelajar dari SMAN 4 Palangka Raya - Kegiatan Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman Provinsi Kalimantan Tengah "<i>Unity in Diversity, Huma Betang goes to Campus 2024</i>", bertempat di Aula Rahan, Gedung Rektorat Universitas Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 300 orang peserta yang berasal dari perwakilan unsur Forkopimda, perwakilan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BEM SENAT/Mahasiswa PTN/PTS, Pelajar SMAN se Kota Palangka Raya, OKP, Media Online, serta Forum Kemitraan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah; - Dialog Ketahanan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertempat di Ballroom Best Western Hotel, Palangka Raya. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang dapat mendukung stabilitas sosial di Kalimantan Tengah.

Secara ringkas kajian terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, adalah sebagai berikut :

a. Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah, data capaian yang ditampilkan merupakan data skor IDI Tahun 2023. Hal ini dikarenakan penilaian Skor IDI baru dilakukan setelah berakhirnya masa Tahun Anggaran yang bersangkutan. Capaian Skor IDI Tahun 2024 yang telah di release sebesar 77,57.

Hal-hal yang mempengaruhi menurunnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah adanya variabel-variabel, tercapainya target antara lain :

- 1) Aspek Kebebasan, terdapat peningkatan dari nilai tahun 2022 sebesar 82,05 menjadi 82,01 pada tahun 2023;
- 2) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai pada tahun 2022 sebesar 78,62 meningkat menjadi 73,07 pada tahun 2023.

b. Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif

Indikator Kinerja Utama Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk pencapaian target ini telah dilaksanakan Kegiatan pembinaan terhadap Ormas, LSM, dan OKP aktif antara lain :

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun 2024, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (5/3/2024) yang diikuti oleh 50 orang peserta yang merupakan anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;

Kegiatan Dialog Interaktif Pemberdayaan Ormas “NGOPI ITAH”, Ngobrol Pintar, Interaktif, Tajam, Makin Berkah dengan Tema : Peran Strategis Ormas dalam menyukseskan Pilkada Serentak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada tanggal 24 Juli 2024. Sebagaimana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;

Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;

Kegiatan Sosialisasi “Kalimantan Tengah Bersinar (Bersih dari Narkotika)” dengan tema “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika, Mewujudkan Kalimantan Tengah Semakin Berkah dan

Menuju Indonesia Emas 2045” yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari pengurus Organisasi Kemasyarakatan / Kepemudaan / Forum / Lembaga yang ada di Kalimantan Tengah;

Dialog Kebangsaan Dalam Mewujudkan Pilkada 2024 yang Aman, Damai, dan Harmoni dengan Tema “Merajut Kerukunan di Tengah Dinamika Pilkada” yang dilaksanakan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat, menciptakan dialog yang konstruktif, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam upaya mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan harmonis, sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila. Peserta dialog ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari Tokoh Adat, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah :

- 1) Sebagai salah satu upaya konstruktif dalam membangun Kembali peran Ormas sesuai perannya masing-masing dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Sebagai upaya penguatan akan rasa dan sikap Nasionalisme yang tinggi disegala kehidupan serta berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Sinergitas dan Kerjasama yang baik antara Ormas, PKK dan Pemerintah dalam menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan, mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan tersebut juga upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan

dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

c. Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain :

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024 di Ruang Berkah Bersinar Abadi Best Western Hotel Palangka Raya. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024” dengan tema Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam menumbuhkembangkan Generasi Yang Tangguh, Mandiri dan Berkarakter Pancasila yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan guru pengampu pendidikan Pancasila pada SMA dan SMK yang ada di Kota Palangka Raya;

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Tahun 2024 dengan tema “Generasi Muda sebagai Agen Perubahan dalam Membangun dan Memperkuat Jati Diri Bangsa Indonesia melalui Nilai-Nilai Bela Negara”. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan siswa/siswi SMA dan SMK di Kota Palangka Raya;

Lomba Cerdas Harati Pancasila diikuti oleh 13 regu yang masing-masing terdiri dari tiga peserta, mewakili kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Para peserta diuji pemahamannya mengenai berbagai aspek Pancasila, wawasan kebangsaan, serta karakter bangsa. Adapun para juri yang akan menilai peserta terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat;

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman

Kantor Walikota Palangka Raya ini diikuti oleh generasi muda perwakilan dari 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah sebanyak 1.000 orang peserta dan dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan, termasuk Plt. Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalimantan Tengah, serta sejumlah perwakilan dari kalangan pelajar dan pemuda;

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diikuti peserta berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Terkait, SMAN / SMKN / SMAS/ SMKS / Sederajat, Forum Pembauran Kebangsaan, Perbankan, Perguruan Tinggi, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya;

Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2024, diikuti peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Anggota Paguyuban FPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Insan Pers di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini mengangkat tema “Peningkatan Peran Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Menangkal Isi Politik Identitas menjelang Pilkada 27 November 2024.” Sosialisasi ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi antar-suku di Kalimantan Tengah, serta mencegah politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat;

Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Barito Timur, diikuti peserta berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, ketua paguyuban/suku dan masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur.

d. Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani

- IKU terkait potensi terjadinya konflik didukung pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (26/7/2024).
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam sambutannya menyampaikan arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi menyambut pilkada di Kalimantan Tengah. Dengan terbukanya aspirasi masyarakat akan menjadi cikal bakal proses demokrasi menjadi lebih matang dan dewasa. Kegiatan rapat koordinasi kegiatan kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi platform untuk memperkuat persatuan dan solidaritas antara masyarakat Dayak di wilayah tersebut. Dalam rangka mewujudkan Kalimantan Tengah damai dan harmoni untuk menyukseskan Pilkada tahun 2024, kegiatan ini dapat memperkuat kerja sama antar komunitas, membangun kebersamaan, serta mengatasi potensi konflik atau perpecahan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada.

9. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

IKU Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Juli 2024 melaksanakan Kegiatan Sosialisasi “Kalimantan Tengah Bersinar (Bersih dari Narkotika)” dengan tema “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika, Mewujudkan Kalimantan Tengah Semakin Berkah dan Menuju Indonesia Emas 2045” yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari pengurus Organisasi Kemasyarakatan / Kepemudaan / Forum / Lembaga yang ada di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan menyikapi situasi terkini mengenai peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diduga akibat penyalahgunaan tanaman kecubung di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana teridentifikasi kasus kematian diduga akibat penyalahgunaan tanaman kecubung dan telah mendapatkan perawatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi tetangga dari Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak luput dari indikasi adanya penyalahgunaan tanaman kecubung tersebut.

Melalui dialog ataupun sosialisasi ini, diharapkan agar semua Tanggap dan Peka terhadap penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Tengah, Mendorong korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Memantau lingkungan sekitar, terhadap perubahan perilaku anggota masyarakat yang mencurigakan terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika khususnya mengenai dugaan penyalahgunaan tanaman kecubung dan melakukan edukasi/sosialisasi melalui media elektronik, sosial media dan platform lainnya mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN).

Pada tanggal 28 Agustus 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Dialog

Kebangsaan Dalam Mewujudkan Pilkada 2024 yang Aman, Damai, dan Harmoni dengan Tema “Merajut Kerukunan di Tengah Dinamika Pilkada” yang dilaksanakan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat, menciptakan dialog yang konstruktif, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam upaya mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan harmonis, sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila. Peserta dialog ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari Tokoh Adat, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 (terlampir).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	-	-	78,25	78,5	78,75	79	79,25	73,17	79,3	77,57	-	-	78,5	-
2.	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	-	-	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	84,44 %	117,87%	100%	-	-	80 %	-
3.	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	-	-	100 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	300 orang	1300	1.439	-	-	200 orang	-
4.	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	-	-	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %	65,63 %	70,59%	37,04%	-	-	80 %	-
5.	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Orang)	-	-	240 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	178 orang	240 orang	600 orang	-	-	200 orang	-

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sesuai telaahan dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L dan Kabupaten/Kota, Implikasi dari RT/RW dan KLHS, dapat dirumuskan isu-isu penting/strategis, sebagai berikut :

2.3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kalimantan Tengah dengan ibukotanya adalah Kota Palangka Raya terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota memiliki luas 157.983 km² dan berpenduduk sekitar 2.490.178 jiwa, yang terdiri atas 1.299.013 laki-laki dan 1.191.165 perempuan (hasil SUPAS 2015).

Dengan luasan wilayah tersebut Provinsi Kalimantan Tengah didiami berbagai macam suku bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia. Suku asli dan dominan di Kalimantan Tengah yaitu Suku Dayak, sedangkan Suku dominan lainnya yakni suku Banjar dan Suku Jawa. Dari segi agama di Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat 5 agama nasional yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, serta terdapat kepercayaan lokal yakni Kaharingan yang merupakan kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah.

Adanya keanekaragaman suku, budaya, agama dan partai politik serta berbagai jenis kelembagaan tersebut menjadikan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang cukup rawan terjadinya perselisihan antar suku dan agama serta gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik.

2.3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

a. Visi

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : **“Kalimantan Tengah Makin**

BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”.

Penyesuaian visi Pembangunan dalam RPJMD 2025-2026 telah disesuaikan yaitu : **“Mengangkat Harkat Martabat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Menggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Maju, Kalimantan Tengah Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045”.**

b. Misi

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;

- f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*ecotourism*) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b) Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c) Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (*smart government*);

- b) Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;
- d) Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan publik;
- e) Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- f) Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- g) Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Pokok misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;

- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut :

- a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Perubahan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai perkembangan, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah menyesuaikan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030 menyesuaikan dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.

2. Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat.
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan keadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.
5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Dari pokok misi diatas, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 memiliki kesesuaian dengan misi ke 5, yaitu **“Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”**.

2.3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Kabupaten/Kota.

Secara hierarki Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara umum arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk tahun 2024 adalah Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kualitas Demokrasi, berupa penanganan konflik sosial dan peningkatan kapasitas Partai Politik.

2.3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, perlu didukung oleh terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga Kerukunan dan Kedamaian Masyarakat akan dapat terpelihara dengan baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Tata ruang wilayah dan lingkungan hidup memiliki pengaruh terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, dengan demikian sangatlah sulit untuk merubah pola kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dengan nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat yang berbeda dengan mengandalkan sifat-sifat kedaerahannya masing-masing.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya benturan kelompok kepentingan dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah kedepan berusaha untuk meningkatkan Kerukunan dan kedamaian masyarakat secara efektif dan efisien.

Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi kendala bagi pemerintah dalam memantau dan memonitor daerah-daerah tertentu yang dimungkinkan terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian setidaknya untuk memperkecil resiko konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir dengan memberikan pendidikan politik, peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan, bela negara, pencegahan tindak kriminal, pembauran dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kalimantan Tengah

dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

- a. Pendidikan Politik bagi masyarakat belum terlaksana secara optimal. Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Kalimantan Tengah serta konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme dan Cinta tanah air masih belum optimal dan cenderung luntur tergerus oleh perkembangan zaman yang sangat dinamis.
- c. Maraknya penyalahgunaan narkoba.
- d. Potensi timbulnya konflik disebabkan kemajemukan masyarakat Kalimantan Tengah.
- e. Potensi konflik yang disebabkan oleh tingginya angka kesenjangan ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah;
- f. Isu Terorisme dan maraknya penyebaran radikalisme di Kalimantan Tengah.
- g. Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial
- h. Kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan nasional tentang pengaruh globalisasi baik pengaruh internal maupun eksternal.
- i. Arah kebijakan yang berhubungan dengan penanganan kasus ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik, terutama pada kasus investasi perkebunan dan pertambangan.
- j. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkai berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan, Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat

penegakan hukum (law enforcement) dan peningkatan demonstrasi yang memprotes kebijakan Pemerintah.

- k. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya conflict and communal violence (konflik dan kekerasan komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.
- l. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan program kegiatan pada tahun 2026 mengacu pada RPJMD 2021-2026, RENSTRA Perangkat Daerah 2021-2026, serta sasaran pokok dan kebijakan yang tertuang di dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2020. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 yang disusun ini akan menjadi bagian dari RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2016-2021. Review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4 (terlampir).

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	Palangka Raya	200 orang	3.049.943.317	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan (Orang)	Palangka Raya	200 orang	2.869.943.317	
8,01,02,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	1 dokumen	3.049.943.317	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	1 dokumen	2.869.943.317	
8,01,02,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	30.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	70.000.000	
8,01,02,1,01,02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	280.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	360.000.000	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Sejarah Kebangsaan										
8,01,02,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	750.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	500.000.000	
8,01,02,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	1.580.028.417	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	150.200.000	
8,01,02,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	4 laporan	159.914.900	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	4 laporan	141.070.031	

[illegible]

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	Palangka Raya	78,5	121.655.203.009	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka)	Palangka Raya	78,5	126.590.458.609	
8,01,03,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Palangka Raya	1 dokumen	121.655.203.009	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Palangka Raya	1 dokumen	126.590.458.609	
8,01,03,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	283.906.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Palangka Raya	1 dokumen	273.906.000	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik di Daerah yang Disusun				
8,01,03,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	170.000.000	
8,01,03,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	317.100.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	574.658.500	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01.03,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	119.591.238.509	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	124.971.894.109	
8,01.03,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	1.312.958.500	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	600.000.000	
8,01,04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	Palangka Raya	80%	663.514.000	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif (Persen)	Palangka Raya	80%	613.514.000	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,04,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	1 dokumen	663.514.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	1 dokumen	613.514.000	
8,01,04,1,01,01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	
8,01,04,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	165.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	140.000.000	
8,01,04,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,04,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	198.514.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	173.514.000	
8,01,04,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	100.000.000	
8,01,05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Palangka Raya	200 orang	1.562.060.250	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Palangka Raya	200 orang	1.512.060.250	
8,01,05,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	1 dokumen	1.562.060.250	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	1 dokumen	1.512.060.250	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,05,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	95.000.000	
8,01,05,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	95.000.000	
8,01,05,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	200 orang	1.192.894.250	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	Palangka Raya	200 orang	1.157.894.000	

[illegible]

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	Palangka Raya	80%	2.311.546.100	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani)	Palangka Raya	80%	1.991.546.100	
8,01,06,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	1 dokumen	2.311.546.100	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	1 dokumen	1.991.546.100	
8,01,06,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	
8,01,06,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Palangka Raya	1 dokumen	117.762.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Palangka Raya	1 dokumen	117.762.000	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				
8,01,06,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	365.961.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	335.961.000	
8,01,06,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	56 orang	661.499.100	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	56 orang	591.499.100	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	serta Penanganan Konflik di Daerah										
8,01,06,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	365.533.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	365.533.000	
8,01,06,1,01,06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	4 dokumen	700.791.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	4 dokumen	480.791.000	
8,01,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	12.643.226.492	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	11.300.808.478	
8,01,01,1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Palangka Raya	6 dokumen	350.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Palangka Raya	6 dokumen	223.928.871	
8,01,01,1,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	2 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	2 dokumen	20.000.000	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,01,1,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	10.000.000	
8,01,01,1,01,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	15.000.000	
8,01,01,1,01,04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	10.000.000	
8,01,01,1,01,05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	1 dokumen	15.000.000	
8,01,01,1,01,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	4 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	4 laporan	10.000.000	
8,01,01,1,01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	4 laporan	270.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	4 laporan	143.928.871	
8,01,01,1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palangka Raya	100%	5.242.506.432	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palangka Raya	100%	5.571.317.542	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,01,1,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	37 orang / bulan	5.066.800.432	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	37 orang / bulan	5.395.611.542	
8,01,01,1,02,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	12 dokumen	160.455.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	12 dokumen	160.455.800	
8,01,01,1,02,04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palangka Raya	4 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palangka Raya	4 dokumen	2.500.000	
8,01,01,1,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	4.014.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	4.014.200	
8,01,01,1,02,06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Palangka Raya	1 dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Palangka Raya	1 dokumen	5.000.000	
8,01,01,1,02,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Palangka Raya	12 laporan	3.736.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Palangka Raya	12 laporan	3.736.000	
8,01,01,1,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Palangka Raya	5 dokumen	27.751.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Palangka Raya	5 dokumen	27.751.600	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,01,1,03,02	Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000	
8,01,01,1,03,06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	4 Dokumen	17.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	17.751.600	
8,01,01,1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	100%	259.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	100%	202.000.000	
8,01,01,1,05,01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Palangka Raya	1 unit	15.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Palangka Raya	1 unit	15.000.000	
8,01,01,1,05,02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	1 paket	88.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	1 paket	88.000.000	
8,01,01,1,05,03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	1 dokumen	54.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	1 dokumen	54.000.000	
8,01,01,1,05,05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Palangka Raya	1 dokumen	102.500.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Palangka Raya	1 dokumen	45.000.000	
8,01,01,1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	Palangka Raya	100%	1.213.122.760	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor	Palangka Raya	100%	1.015.708.000	
8,01,01,1,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Palangka Raya	1 paket	170.546.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Palangka Raya	1 paket	170.546.000	

[illegible]

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,01,1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	1.018.635.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	1.018.635.700	
8,01,01,1,08,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	4 laporan	1.920.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	4 laporan	1.920.000	
8,01,01,1,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palangka Raya	4 laporan	220.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palangka Raya	4 laporan	220.000.000	
8,01,01,1,08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	4 laporan	796.715.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	4 laporan	796.359.300	
8,01,01,1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	2.281.710.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palangka Raya	100%	1.732.066.400	
8,01,01,1,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palangka Raya	21 Unit	307.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palangka Raya	21 Unit	307.360.000	
8,01,01,1,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palangka Raya	1 unit	1.930.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palangka Raya	1 unit	1.380.356.400	

Kode	Rancangan Awal					Rancangan Akhir					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,01,01,1,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Palangka Raya	20 Unit	24.830.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Palangka Raya	20 Unit	24.830.000	
8,01,01,1,09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Palangka Raya	30 Unit	19.520.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Palangka Raya	30 Unit	19.520.000	
TOTAL PAGU INDIKATIF					141.885.493.168						144.878.330.754

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Tahapan-tahapan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 antara lain dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD, RKPD Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya dapat disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini belum ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten / kota yang ditujukan langsung kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (tabel 2.5 terlampir).

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>NIHIL</i>				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 berpedoman pada Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan memperhatikan sinergitas antara program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah :

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2025-2029 disusun sebagai penjabaran Visi Misi, Program Aksi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan visi pembangunan nasional yaitu Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode 2025-2029 adalah Menciptakan masyarakat yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dan menciptakan kehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan dinamis.

Tujuan strategis bidang politik dan pemerintahan umum adalah **“Kokohnya Persatuan dan Kesatuan serta Karakter Bangsa melalui pengamalan Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebhinekaan sebagai tatanan serta perilaku hidup berbangsa dan Bernegara”**. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, dengan indikator kinerja utama yaitu jumlah peristiwa konflik sosial.
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas, dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu dan pilkada; dan Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada.

Keterkaitan agenda pembangunan RPJMN tahun 2025 – 2029 dengan bidang urusan politik dan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. (Melalui fasilitasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, fasilitasi politik dalam negeri, dan fasilitasi ormas).
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. (Fasilitasi politik dalam negeri).
3. Melakukan revolusi karakter bangsa. (Bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan).
4. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. (Bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan serta Fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, maka Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan :

- a. Terwujudnya pengamalan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kemasyarakatan di Kalimantan Tengah .
- d. Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Kalimantan Tengah yang demokratis, sehat dan santun.

3.2.2 Sasaran :

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
- b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif;
- d. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3 di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2025.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Demokrasi
2. Meningkatkan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP

3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan
4. Meningkatkan Kewaspadaan Dini di Daerah

Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan strategis tersebut sebesar Rp. 32.566.509.985,-. Nilai Total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 (terlampir).

Tabel 3.3
RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8,01,02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	Palangka Raya	200 orang	3.811.270.000	APBD	IKU	200 orang	3.811.270.000
8,01,02,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Palangka Raya	1 dokumen	3.811.270.000	APBD		1 dokumen	3.811.270.000
8,01,02,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8,01,02,1,01,02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	360.000.000	APBD		1 dokumen	360.000.000
8,01,02,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	500.000.000	APBD		100 orang	500.000.000
8,01,02,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	100 orang	120.000.000	APBD		100 orang	120.000.000
8,01,02,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Palangka Raya	4 laporan	120.200.000	APBD		4 laporan	120.200.000
8,01,02,1,01,06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Palangka Raya	1 dokumen	141.070.000	APBD		1 dokumen	141.070.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8,01,02,1,01,07	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				10.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
8,01,02,1,01,08	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8,01,02,1,01,09	Pelaksanaan tugas Paskibraka				1.850.000.000	APBD		1 dokumen	1.850.000.000
8,01,02,1,01,10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				10.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
8,01,02,1,01,11	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8,01,02,1,01,12	Pembentukan Paskibraka				400.000.000	APBD		1 dokumen	400.000.000
8,01,03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Palangka Raya	79,00	9.291.372.685	APBD	IKU	79,25	9.291.372.685
8,01,03,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Palangka Raya	1 dokumen	9.291.372.685	APBD		1 dokumen	9.291.372.685
8,01,03,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	273.906.000	APBD		1 dokumen	273.906.000
8,01,03,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	40.077.000	APBD		1 dokumen	40.077.000
8,01,03,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Palangka Raya	100 orang	169.108.500	APBD		100 orang	169.108.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8,01,03,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	8.552.440.185	APBD		100 orang	8.552.440.185
8,01,03,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	255.841.000	APBD		4 laporan	255.841.000
8,01,04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	Palangka Raya	80%	913.514.000	APBD		85%	913.514.000
8,01,04,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Palangka Raya	1 dokumen	913.514.000	APBD		1 dokumen	913.514.000
8,01,04,1,01,01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8,01,04,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	140.000.000	APBD		1 dokumen	140.000.000
8,01,04,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	50 orang	400.000.000	APBD		50 orang	400.000.000
8,01,04,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	Palangka Raya	50 orang	173.514.000	APBD		50 orang	173.514.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
8,01,04,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	100.000.000	APBD		4 laporan	100.000.000
8,01,05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Palangka Raya	200 orang	1.917.060.000	APBD	IKU	200 orang	1.917.060.000
8,01,05,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Palangka Raya	1 dokumen	1.917.060.000	APBD		1 dokumen	1.917.060.000
8,01,05,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	95.000.000	APBD		1 dokumen	95.000.000
8,01,05,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	95.000.000	APBD		1 dokumen	95.000.000
8,01,05,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	200 orang	1.157.894.000,	APBD		200 orang	1.157.894.000,
8,01,05,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	100 orang	300.000.000,	APBD		200 orang	300.000.000,
8,01,05,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Palangka Raya	4 laporan	269.166.000	APBD		4 laporan	269.166.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8,01,06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai)	Palangka Raya	80%	2.050.590.005	APBD	IKU	85%	2.050.590.005
8,01,06,1,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Palangka Raya	1 dokumen	2.050.590.005	APBD		1 dokumen	2.050.590.005
8,01,06,1,01,01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
8,01,06,1,01,02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Palangka Raya	1 dokumen	217.762.000	APBD		1 dokumen	217.762.000
8,01,06,1,01,03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	100 orang	335.961.000	APBD		100 orang	335.961.000
8,01,06,1,01,04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Palangka Raya	56 orang	571.499.100	APBD		56 orang	571.499.100
8,01,06,1,01,05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Palangka Raya	4 laporan	365.533.000	APBD		4 laporan	365.533.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
8,01,06,1,01,06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Palangka Raya	4 dokumen	459.834.905	APBD		4 dokumen	459.834.905
		TOTAL PAGU INDIKATIF			32.566.509.985				32.566.509.985

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel ini berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran RENSTRA PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Total kebutuhan dan untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 39.434.071.615,-. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti ditunjukkan pada tabel 4.1 (terlampir).

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudka n ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD				12 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		PRIORITAS	TAR GET		PAGU INDIKATIF (Rp)		

						OPD TAHUN 2025	2026			SUMBER DANA	NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat dem kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	217.000.000,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	217.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		54.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudka n ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.136.369.000			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	1.136.369.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		120.546.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	10.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		10.162.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.070.661.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudkan ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		845.661.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.204.640.000			-	Mewujudka n ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	1.384.555.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudka n ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		202.915.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Mewujudkan ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.428.279.000			-	Mewujudka n ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	2.202.364.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudka n ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya NKRI	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya NKRI	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	120.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya NKRI	-		150.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demokratisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demokratisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				0 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyara kat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				-	-	9.291.372.685						-	18.202.138.500	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-					9.291.372.685			-	Mewujudkan ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyara kat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	18.202.138.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	169.108.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		169.108.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	8.552.440.185	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		17.433.206.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	255.841.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		285.841.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					-	913.514.000						-	1.013.514.000	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	913.514.000			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya NKRI	-	-	1.013.514.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	217.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		217.762.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	335.961.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		335.961.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				56 Orang	591.499.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		591.499.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	365.533.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan ketertarikan dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		365.533.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4 Dokumen	459.834.905	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	Mewujudka n ketentram an dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta menin gkatkan rasa percaya dan harmo nisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya NKRI	-		459.834.905	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun menyesuaikan dengan RPJMD dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2025-2030.

Rencana Kerja Perangkat Daerah telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung capaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Penyesuaian ketersediaan anggaran selalu dilakukan efisiensi, maka dirumuskan pelaksanaan kegiatan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan agar target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dicapai.

Proses perencanaan tidak meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kinerja diselenggarakan secara tepat sasaran. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana memudahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk merealisasikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Penjabaran Renja ke dalam RKA, maka harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan secara detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian program.

Pelaksanaan Renja tahun lalu, mengarahkan optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita, Amin.

Palangka Raya, September 2025

KERALA BADAN,

Dr. H. M. KATMA F. DIRUN, SE., MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661022-199308 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN